

**PENYITAAN TERHADAP ASET KRIPTO DALAM PENEGAKAN  
HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM  
PIDANA**

**TESIS**

Oleh

**RYAN TIANTORO PUTRA  
(2302198003)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2026**

**PENYITAAN TERHADAP ASET KRIPTO DALAM PENEGAKAN HUKUM OLEH  
PENYIDIK POLRI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**RYAN TIANTORO PUTRA**

**(2302198003)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2026**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ryan Tiantoro Putra  
NIM : 2302198003  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul  
**“PENYITAAAN TERHADAP ASET KRIPTO DALAM PENEGAKAN  
HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM  
PIDANA”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 20 Oktober 2025

  
METERAI  
TEMPEL  
Rp 6000  
F6ANX236392894  
**Ryan Tiantoro Putra**  
NIM: 2302198003



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**PENYITAAN TERHADAP ASET KRIPTO DALAM PENEGAKAN  
HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI DALAM PEMBAHARUAN  
HUKUM PIDANA**

Oleh:

Nama : Ryan Tiantoro Putra  
NIM : 2302198003  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 20 Oktober 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

**Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.**  
NIP/NIDN: 951400/0304026301

Pembimbing II

**Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H. M.TL**  
NIDN: 8931720021

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister

  
**Dr. Paltada Saragi, S.H., M.H.**  
NIDN: 0305097105

Dekan

Fakultas Hukum

  
**Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.**  
NIDN: 0302117904



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 15 Januari 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Ryan Tiantoro Putra  
NIM : 2302198003  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“PENYITAAN TERHADAP ASET KRIPTO DALAM PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H, M.Hum.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Drs Tatok Sudjiarto, S.H., M.H. M.TL	Sebagai Anggota	
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 15 Januari 2026



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ryan Tiantoro Putra  
NIM : 2302198003  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : Penyitaan Terhadap Aset Kripto Dalam Penegakan Hukum  
Oleh Penyidik Polri Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 20 Oktober 2025



**Ryan Tiantoro Putra**  
NIM: 230219800

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“PENYITAAN TERHADAP ASET KRIPTO DALAM PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA”**, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Tesis ini berisi tentang urgensi pengembangan regulasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk penyitaan aset kripto sebagai dasar penegakan hukum, menganalisis kesenjangan regulasi saat ini, kendala teknis dan hukum dalam penyitaan aset digital, serta memberikan rekomendasi berupa regulasi khusus, SOP, pelatihan forensik digital, dan kerja sama internasional guna mendukung efektivitas penegakan hukum di era ekonomi digital.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para pembimbing, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. Mompang L.Panggabean, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing 1, Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H. M.TL, selaku Pembimbing 2. 1, dan serta selaku Penguji, yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya tesis ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Dr. David Maruhum Lumban Tobing, S.H., M.Kn., Ketua Yayasan

Universitas Kristen Indonesia (UKI).

2. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
3. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (UKI).
4. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. Prof. Dr. Mompang L.Panggabean, S.H, M.Hum, dan selaku Pembimbing I pada Ujian Penelitian Proposal, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Tesis ini.
6. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H. M.TL, dan selaku Pembimbing II pada Ujian Penelitian Sidang Tesis, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Tesis ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang tidak penulis sebutkan satu per satu.
8. Orangtua, istri dan anak yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi yang tak pernah surut dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi dalam penulisan Tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya disertasi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi di bidang Hukum.

Jakarta, 20 Oktober 2025

Penulis,  
Ryan Tiantoro Putra

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b><i>xi</i></b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	15
F. Kerangka Konseptual .....	28
G. Metode Penelitian .....	36
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
A. Sumber Hukum/ Teori Hukum .....	70
B. Perbandingan Hukum.....	109
C. Objek Penelitian yang Mengandung Variabel-variabel Penelitian .....	121
<b>BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>128</b>
A. Pengaturan Penyitaan Aset Kripto Dalam Pembaruan Hukum Pidana	

Di Indonesia.....	128
1. Dasar hukum penyitaan aset kripto.....	131
2. Tahapan penyitaan aset kripto oleh Penyidik Polri .....	132
<b>BAB IV KENDALA DAN UPAYA PENYITAAN ASET KRIPTO DALAM</b>	
<b>PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI .....</b>	<b>160</b>
A. Laporan dan deteksi awal .....	160
B. Pengumpulan bukti digital.....	160
C. Identifikasi dompet digital dan pelaku .....	160
D. Penyitaan dan pembekuan aset.....	164
E. Analisis forensik dan pengembangan kasus .....	164
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>205</b>
A. Kesimpulan.....	205
B. Saran.....	208
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>211</b>
<b>Hasil Wawancara atau Penelitian .....</b>	<b>219</b>

## ABSTRAK

Judul Tesis: PENYITAAN TERHADAP ASET KRIPTO DALAM PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Penelitian ini membahas urgensi formulasi peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penyitaan aset kripto sebagai dasar penegakan hukum di Indonesia, di tengah pesatnya perkembangan teknologi blockchain dan aset digital seperti Bitcoin serta Ethereum. Latar belakang masalah menyoroti bagaimana aset kripto semakin dimanfaatkan dalam kejahatan siber, pencucian uang, dan pendanaan terorisme, sementara regulasi existing seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang TPPU belum sepenuhnya mengakomodasi sifat desentralisasi, anonimitas, dan lintas yurisdiksi aset kripto. Rumusan masalah difokuskan pada pengaturan penyitaan aset kripto dalam pembaruan hukum pidana serta kendala dan upaya yang dihadapi penyidik Polri, dengan tujuan menganalisis kesenjangan regulasi dan memberikan rekomendasi adaptif.

Dalam kerangka pemikiran, penelitian mengadopsi teori pembaruan hukum, penegakan hukum, dan hukum progresif dari Sudarto, Barda Nawawi Arief, serta Satjipto Rahardjo, untuk menganalisis konsep penyidikan, penyitaan, aset kripto, dan cyber crime. Temuan menunjukkan bahwa penyitaan aset kripto menghadapi kendala seperti ketiadaan otoritas sentral, kesulitan akses private key, regulasi yang belum komprehensif, serta keterbatasan infrastruktur dan kapasitas penyidik Polri. Upaya yang dilakukan mencakup pelacakan melalui analisis blockchain, kerja sama internasional dengan Interpol dan FATF, serta penyimpanan aset dalam cold wallet, meskipun masih bergantung pada pedoman Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2023.

Kesimpulan menyatakan bahwa pengaturan penyitaan aset kripto didasarkan pada KUHP Pasal 39, UU TPPU, dan rekomendasi FATF, tetapi memerlukan pembaruan untuk mengatasi sifat unik aset digital. Saran meliputi pengembangan regulasi khusus, SOP penyitaan aset kripto, pelatihan forensik digital bagi penyidik, peningkatan koordinasi internasional, serta mekanisme pengelolaan dan pelepasan aset sitaan yang transparan. Penelitian ini berkontribusi secara praktis bagi Polri dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan secara teoritis dalam pengembangan hukum adaptif terhadap inovasi digital.

**Kata kunci:** Aset kripto, penyitaan, penegakan hukum, blockchain, regulasi.

## ABSTRACT

*Thesis Title: SEIZURE OF CRYPTOCURRENCY ASSETS IN LAW ENFORCEMENT BY INDONESIAN NATIONAL POLICE (POLRI) INVESTIGATORS WITHIN THE RENEWAL OF CRIMINAL LAW*

*This study addresses the urgency of formulating regulations for the Republic of Indonesia Police (Polri) regarding the seizure of crypto assets as a foundation for law enforcement in Indonesia, amid the rapid development of blockchain technology and digital assets such as Bitcoin and Ethereum. The background highlights how crypto assets are increasingly exploited in cybercrimes, money laundering, and terrorism financing, while existing regulations, such as the Code of Criminal Procedure (KUHAP) and the Anti-Money Laundering Law (UU TPPU), have yet to fully accommodate the decentralized, anonymous, and cross-jurisdictional nature of crypto assets. The research focuses on the regulatory framework for crypto asset seizure within criminal law reform, as well as the challenges and efforts faced by Polri investigators, aiming to analyze regulatory gaps and provide adaptive recommendations.*

*Within its theoretical framework, the study adopts the theories of legal reform, law enforcement, and progressive law from Sudarto, Barda Nawawi Arief, and Satjipto Rahardjo to analyze the concepts of investigation, seizure, crypto assets, and cybercrime. Findings indicate that crypto asset seizure faces obstacles such as the absence of a central authority, difficulties in accessing private keys, incomplete regulations, and limitations in Polri's infrastructure and investigator capacity. Efforts undertaken include transaction tracing through blockchain analysis, international cooperation with Interpol and FATF, and asset storage in cold wallets, though these still rely on the Attorney General's Guidelines Number 7 of 2023.*

*The study concludes that the regulation of crypto asset seizure is based on KUHAP Article 39, UU TPPU, and FATF recommendations, but requires updates to address the unique characteristics of digital assets. Recommendations include developing specific regulations, standard operating procedures (SOPs) for crypto asset seizure, digital forensic training for investigators, enhanced international coordination, and transparent mechanisms for managing and auctioning seized assets. This research contributes practically to improving Polri's law enforcement effectiveness and theoretically to developing adaptive legal frameworks for digital innovation.*

**Keywords:** *Crypto assets, seizure, law enforcement, blockchain, regulation.*